

## BAB II

### KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi dalam bahasa Indonesia, miskin atau kemiskinan adalah suatu keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah.<sup>20</sup>

Kemiskinan secara terminologi didefinisikan keadaan dimana terjadi kekurangan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.<sup>21</sup>

Manusia secara umum akan selalu ditimpa kemiskinan karena kebutuhannya akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan budaya dan kemajuan peradabannya, sehingga masalah kemiskinan tersebut adalah relatif.

Para ahli membedakan kemiskinan menjadi empat, antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 273.

<sup>21</sup> <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/04/definisi-kemiskinan.html>, diakses tanggal 09 Agustus 2010

<sup>22</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 326.

1. Kemiskinan Absolut

Yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang pendapatannya sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi *basic need* (kebutuhan pokok) untuk bertahan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Yaitu seorang atau sekelompok masyarakat yang pendapatannya di bawah angka rata-rata atau dibawah nilai standar tertentu.

3. Kemiskinan Struktural

Yaitu menunjukkan pada ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh (sebagai akibat dari) struktur masyarakat yang menghalangi. Salah satu contoh struktur masyarakat yang menimbulkan kemiskinan adalah pola pemilik sumber daya produksi yang begitu timpang, yang menyebabkan pihak yang lemah tidak bisa berkutik, sedangkan pihak yang berpeluang mengeksploitasi semauanya (mencari keuntungan sendiri dengan memeras orang lain)

4. Kemiskinan Sosial Budaya

Yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh suatu atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Misalnya pandangan masyarakat terhadap nilai kerja, terhadap waktu, dan terhadap alam sekitar dapat menyebabkan suatu masyarakat tertinggal. Pandangan masyarakat yang menghargai kerja keras, disiplin, mandiri, dan tanggungjawab akan mendorong kemajuan, sebaliknya pandangan

masyarakat yang kurang menghargai kerja keras, kedisiplinan, dan mudah melempar tanggung jawab kepada pihak lain menyebabkan masyarakat itu tertinggal dan miskin.

Adapun beberapa talak ukur yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat, antara lain:

#### 1. Setara Dengan Beras

Sebagaimana yang dikutip T. gilarso dari Sayongya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman oleh Sucipto Wirasarjana, yaitu batasan atau ukuran kemiskinan menggunakan tingkat konsumsi atau pengeluaran setara jumlah Kg (kilo Gram) beras per orang dalam tempo setahun.<sup>23</sup>

Batasan kemiskinan	kota	desa
- Miskin	480-600	320-480
- Sangat miskin	360-480	240-360
- Melarat	270-360	180-360

#### 2. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia menetapkan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, termasuk kategori miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis

---

<sup>23</sup> Ibid, 328.

kemiskinan US \$ 1 per hari bagi negara-negara berkembang dan US \$ 2 bagi negara-negara maju.<sup>24</sup>

### 3. Garis Batas Nishab

Ahli ekonomi Islam ada yang berpendapat bahwa garis batas *Nisab* dapat dijadikan sebagai ukuran yang membedakan penduduk kaya dan miskin, dimana Islam memberikan batasan yang cukup jelas antara yang mampu (wajib zakat) dengan orang miskin (penerima zakat). Batasan wajib zakat adalah penghasilan yang telah lebih dari satu *nisab* atau setara dengan 94 gram emas murni dalam jangka waktu setahun.

### 4. Ukuran Menurut (PP No. 42/1981) tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.

Tolak ukur yang di gunakan oleh PP No.42/ 1981 di dasarkan pada biaya pengeluaran rendah atau berada di bawah garis kemiskinan, yaitu kurang dari Rp. 42.380,00 untuk masyarakat perkotaan dan Rp. 33.590,00 untuk masyarakat pedesaan, per orang, per bulan diluar kebutuhan non-pangan.<sup>25</sup>

### 5. Badan Pusat Statistik

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Soekarni, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam*, ed. Jusmaliani et.al. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 127.

<sup>25</sup> Imam Sutyono. "Mengakhiri Episode Kemiskinan". <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/05/mengakhiri-episode-kemiskinan/> diakses tanggal 9 Agustus 2010.

<sup>26</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kemiskinan-di-indonesia-2/> diakses tanggal 8 agustus 2010



1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
  2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
  3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
  4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual ataupun massa.
  5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
  6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
  7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
  8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
  9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
6. Ukuran menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
-

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Tahapan Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I

Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:

- 1 Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2 Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3 Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik.
- 4 Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5 Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6 Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 s/d 6) dan indikator berikut:

- 1 Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

---

<sup>27</sup> <http://direktoritangsel.com/direktori/item/7-sosial?tmpl=component&print=1>. diakses tanggal 16 september 2010.

- 2 Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/ telur.
- 3 Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.
- 4 Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
- 5 Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 6 Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7 Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- 8 Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

#### 4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 s/d 14) dan indikator berikut:

- 1 Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2 Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3 Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

- 4 Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  - 5 Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 s/d 19) dan indikator berikut:

- 1 Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2 Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Dari talak ukur di atas dapat dilihat berbagai indikator yang digunakan para ahli untuk mengukur tingkat kemiskinan, dan di gunakan sebagai bahan acuan untuk mencari solusi bagi permasalahan kemiskinan.

#### **B. Penyebab Terjadinya Kemiskinan**

banyak pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan. Namun, secara garis besar ada tiga sebab utama kemiskinan:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/06/syariat-islam-dan-masalah-kemiskinan/>. Diakses tanggal 19 Agustus 2010.



1. Kemiskinan alamiah

Yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang, misalnya, cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.

2. Kemiskinan cultural

Kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu, misalnya, rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.

3. Kemiskinan structural

kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan struktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara dewasa ini. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

Ada banyak penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan, misal dalam lingkup negara kemiskinan bisa bersumber dari kelangkaan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, kurangnya penguasaan teknologi dan tidak meratanya akumulasi kapital. Menurut Soekarni, teori-teori awal pertumbuhan ekonomi umumnya menyoroiti pentingnya akumulasi modal. Artinya

sebuah negara bisa menjadi kaya jika ia memiliki kemampuan untuk mengakumulasi modal.<sup>29</sup> Sebaliknya negara yang tidak memiliki akses terhadap modal akan terus miskin

Selanjutnya dari sisi individu atau keluarga penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi, antara lain:

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya alam, dalam hal ini dapat berupa sumber daya produksi sehingga menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang, karena penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan upah yang rendah pula. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini bisa karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, kurangnya pelatihan, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal.<sup>30</sup> Modal adalah sarana penting dalam melakukan usahanya sedangkan jika tidak memiliki modal yang cukup maka seseorang tidak bisa berusaha dan akhirnya akan terjebak dengan kemiskinan karena kurangnya modal.

---

<sup>29</sup> Muhammad Soekarni, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam*, ed. Jusmaliani et.al. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 118.

<sup>30</sup> Mudrajad Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 131.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan, (*vinicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas.

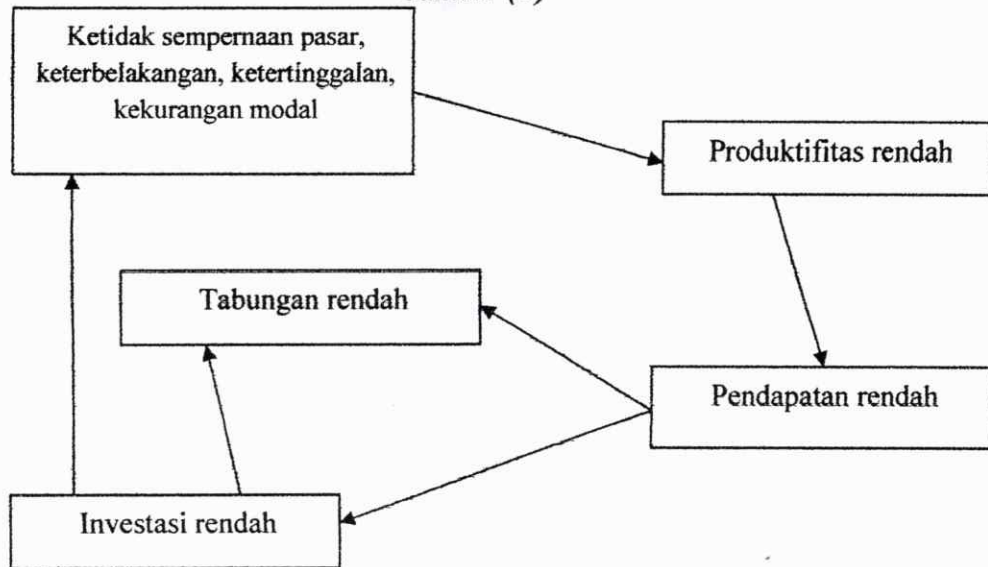
Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Mudrajad Kuncoro yang mengutip dari pernyataan Agnar Nurkse ekonom pembangunan ternama, dalam bukunya *problem of capital, Foemation in Under Developped Countries, 1953*. Ia mengatakan bahwa: " *negara-negara miskin itu karena mereka itu miskin, dan justru karena miskinnya itu, masalah kemiskinan begitu sulit diatasi.*"<sup>31</sup> Ini memiliki makna bahwa negara miskin akan sulit mengatasi kemiskinan itu sendiri, kecuali masyarakat mau berubah dan berusaha lebih keras

---

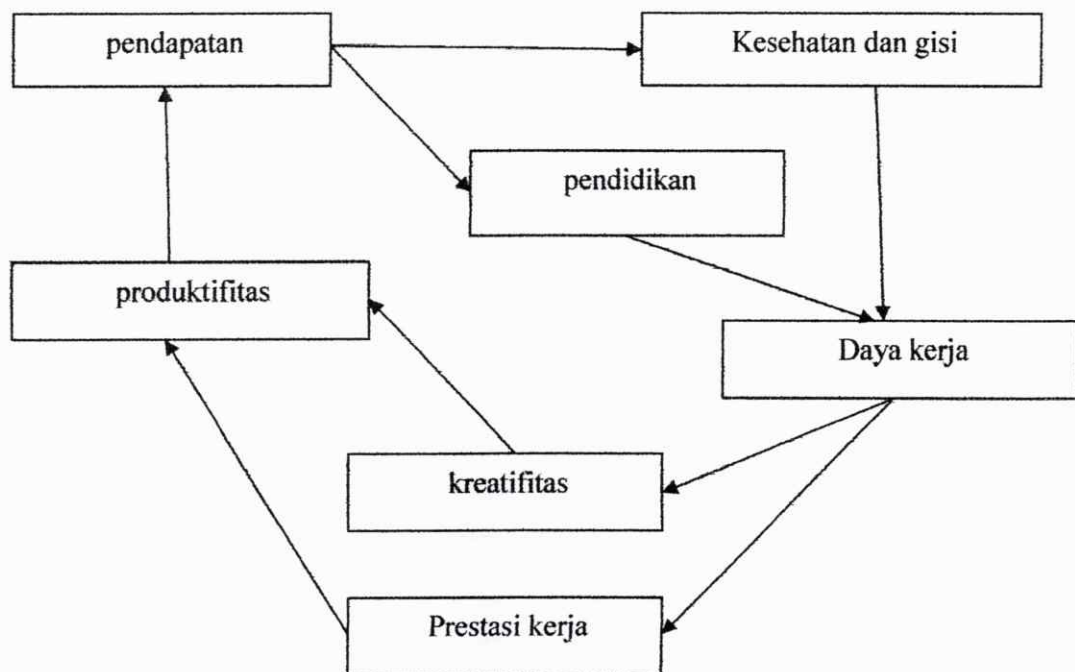
<sup>31</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 329.

**Gambar 1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan**  
**Versi nurkse<sup>32</sup>**

*Gambar (A)*



*Gambar (B)*



<sup>32</sup> Ibid, 329.

Lingkaran-lingkaran ini menjawab pertanyaan mengapa suatu masyarakat itu miskin. "suatu negara itu miskin" itulah sebabnya. Lingkaran sebab akibat yang tak pernah berujung pangkal itu disebut lingkaran setan.

Pada gambar (A) tidak jelas mana awal dan akhirnya, atau dimana sebab dan yang mana akibatnya. Untuk lebih mudahnya dimulai dari dengan pendapatan yang rendah. Pendapatan rendah itu menyebabkan baik tabungan maupun permintaan menjadi rendah sama-sama menyebabkan investasi rendah. Tabungan dan permintaan yang rendah sama-sama menyebabkan investasi rendah. Investasi rendah menyebabkan kekurangan modal dan seterusnya berputar menjadi semakin rendah dan semakin rendah.

Atau perhatikan gambar yang (B) pendapatan yang rendah menyebabkan baik tingkat pendidikan maupun kesehatan dan gizi kurang. Ini menyebabkan daya kerja rendah. Prestasi kerja rendah menyebabkan produktifitas rendah. Produktifitas kerja rendah menyebabkan pendapatan rendah, yang gilirannya menyebabkan kesehatan dan gizi semakin buruk, demikian seterusnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 330.



### C. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam

Salah satu hal yang ditekankan al-Qur'an dalam membicarakan tentang kemiskinan ialah perlunya membantu mereka yang mengalami kemiskinan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Penekanan ini bertujuan: (1) untuk menjaga kelangsungan hidup orang miskin dan membantu mereka untuk menanggulangi kesulitan hidup yang dialami, (2) untuk menghindarkan mereka dari perbuatan yang tercela karena pengaruh kemiskinan. Kedua hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia lahir dan batin, materiil dan spiritual, dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Kewajiban untuk membantu orang miskin banyak disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

*"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (Qs. Al-maa'uun: 1-3).<sup>35</sup>*

Ayat di atas sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

<sup>34</sup> Hamdar Arraiyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Prespektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 52.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Jumanatul 'Ali. Terj.* Lajnah Pentashih Mushaf (Jakarta: J-Art, 2005), 1108

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿١٧﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٨﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ  
 الْمِسْكِينَ ﴿١٩﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٢٠﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢١﴾ حَتَّى  
 أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٢٢﴾

*"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian". (QS al-Mudatsir: 42-47).<sup>36</sup>*

Ayat diatas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya golongan manusia ke dalam neraka karena tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh yang hidup melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakkan.

Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan juga sudah banyak di pikirkan oleh para pemikir-pemikir ekonomi sejak zaman dahulu hingga sekarang, baik itu ekonom konvensional maupun ekonom muslim. Akan tetapi upaya-upaya itu belum bisa mendatangkan hasil yang optimal.

Beberapa tokoh muslim yang konsen terhadap permasalahan kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kepuasan akan kebutuhan dasar, meliputi makanan, minuman, pakaian,

<sup>36</sup> Ibid, 995.

dan perumahan, yang mana dari keempat esensi tersebut harus memuaskan kondisi yang diperlukan yang sebagaimana digambarkan dalam Islam. Dalam hal ini orang-orang kaya juga memiliki peran dalam memenuhi kewajiban terhadap kaum miskin.

Sebagaimana yang dikutip oleh Ely masykuroh, tentang hak muslim atas pemerintah Ibnu Hazm dalam bukunya *Al-Muhalla* menulis:<sup>37</sup>

- a. Tiap muslim berhak mendapatkan kebutuhan hidup, air dan pakaian. Pemerintah jangan sampai membiarkan umat muslim kelaparan, sementara orang-orang non muslim lebih berpunya dan hidup serba mewah.
- b. Umat muslim berhak mendapatkan pendidikan serta pemerintah bertanggung jawab mengadakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab mengadakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya karena memang berhak.
- c. Pemerintah bertanggungjawab terhadap kehidupan, harta milik, harkat dan martabat kaum muslimin.
- d. Pemerintah bertanggungjawab dalam mengadaan transparansi dan perlindungan keamanan perjalanan setiap warga negaranya.

Berkenaan kewajiban bagi orang kaya terhadap orang miskin dan anak yatim, Ibnu Hazm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat yang wajib.<sup>38</sup>

## 2. Ibnu Taymiyah

Dalam pandangan Ibnu taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Sudah menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu masyarakatnya agar mampu

<sup>37</sup> Eli Masykurah, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 285.

<sup>38</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), 141.



mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Sebagaimana yang dikutip oleh A.A Islahi dalam daftar pengeluaran publik dan negara Ibnu Taimiyah menulis:

Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapapun yang tidak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi harus dibantu dengan uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak ada masalah bahwa mereka itu para peminta-minta atau serdadu, pedagang, tukang maupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tidak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu, misalnya seorang tukang kayu yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi, atau seorang pedagang yang hasil dagangannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau anggota tentara yang tanah ganjarannya (*iqfa'*) tak mencukupi kebutuhannya. Semua berhak atas bantuan sedekah.<sup>39</sup>

Dalam pandangan Ibnu Taymiyah bahwa tanggung jawab Negara tidak saja berhenti pada pemenuhan penghasilan nafkah kehidupan untuk memenuhi standar hidup minimal semata, tapi harus diusahakan betul agar penduduk mampu memiliki standar hidup yang lebih baik dan membantu mereka agar bisa hidup mandiri. Hal ini dapat diwujudkan melalui otoritas penuh pemerintah untuk:

- a. Menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian Negara, seperti penimbunan suatu komoditi oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan tertentu.

---

<sup>39</sup> A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah. Terj. Anshari Thoyib.* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 228.

- b. Penetapan upah buruh sebagai bagian dari upaya memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan, sehingga keduanya memperoleh keadilan.
- c. Mewajibkan produsen dan pekerja menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dengan jaringan pengadaan yang pendek dan sederhana.
- d. Menerapkan larangan atas system bunga, pengembangan lembaga zakat, *kafarat* (denda tertentu berupa uang), sedekah (*al-shadaqaat al-naafilah*), hibah (*'ataya*) oleh pemerintah, kewajiban setiap orang untuk sanak kerabat, hak tetangga, penghargaan terhadap kerja dan bisnis serta mencala pengangguran, yang mana semua itu merupakan elemen dari prinsip ajaran Islam atau merupakan konsep Islam untuk menghapuskan kemiskinan.<sup>40</sup>

Dari kebijakan pelaksanaan otoritas tersebut merupakan bentuk dari pendistribusian pendapatan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

### 3. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Negara hendaknya berfungsi sebagai penolong dan membantu rakyat dalam menjalankan usaha mereka secara lebih efisien, mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang

---

<sup>40</sup> Ibid, 228



berbahaya dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan. Hal ini dapat diwujudkan otoritas pemerintah melalui:<sup>41</sup>

1. Negara hendaknya merupakan lembaga yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain, dan menghindari perpajakan yang membebani.
2. Negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan dan Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena.

Dengan demikian Negara merupakan sebuah lembaga yang menjamin berlakunya syariah, dan berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan.

### 3. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi Islam memiliki dua jalur untuk mengatasi kemiskinan yakni: pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Al-Qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta, dan disinilah kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjembatani berbagai aspek kesenjangan ini.

---

<sup>41</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), 33

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sarana yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Bekerja

Usaha untuk bekerja merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan, karena dengan bekerja orang menghasilkan harta benda (kekayaan). Motivasi dan *reward* untuk bekerja ini cukup banyak diberikan al-Qur'an. Dalam al-Qur'an disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*<sup>43</sup>  
(Qs. Al Jumu'ah: 10)

Akan tetapi pada kenyataannya, lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia, maka Islam mengatur kewajiban pemerintah dalam hal ini: pertama, orang kaya memberikan bantuan kepada pengangguran. Kedua, pemerintah harus berusaha optimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila kedua langkah ini belum dapat mengatasi kurangnya lapangan kerja, maka Islam menganjurkan untuk mencari pekerjaan di tempat lain (merantau).

b. Jaminan family dekat yang mampu

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Terj. Amaimun Syamsudin dan A.wahid Hasan. (Yongyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 51.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf (Jakarta: J-Art, 2005), 933.

Lilitan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi menurut Islam juga dapat diatasi dengan adanya jaminan dari masing-masing anggota keluarga. Islam menempatkan posisi kerabat atau family dekat sebagai orang yang harus peduli dan saling membantu kesulitan kerabat yang lain.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. An-Nahl: 90).<sup>44</sup>*

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>45</sup> (Qs. Al Anfaal: 75).*

### c. Zakat

Tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Fakir miskin adalah sasaran pertama dari pendistribusian zakat. Dengan keberadaan zakat sebagai sedekah wajib, pemerintah

<sup>44</sup> Ibid, 415.

<sup>45</sup> Ibid, 274.

dapat memaksa rakyatnya yang mampu untuk menyediakan dana bagi penanggulangan kemiskinan melalui instrument zakat.

d. Jaminan kas Islam dengan berbagai sumbernya

Selain dari zakat, *Baitul Maal* (kas Islam) juga mempunyai sumber dana lain yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf, pertambangan, kekayaan alam, dan lain sebagainya. Sumber ekonomi itu tidak boleh dipegang oleh individu apalagi untuk kepentingan sendiri, melainkan harus berada di tangan Negara agar semua orang dapat merasakan manfaatnya. Seluruh pemasukan terhadap kas Islam merupakan sumber ekonomi bagi fakir miskin, ketika perolehan zakat tidak mencukupi permintaan.

e. Hak-hak selain zakat

Hak-hak selain zakat tersebut di antaranya adalah: hak bertetangga, korban Hari Raya Idul Adha, sanksi pelanggaran sumpah (memberi makan sepuluh orang miskin) sanksi *dhihar* (memberi makan 60 orang miskin) sanksi *kafarah* (memberi makan 60 orang miskin), *fidyah* seorang jatuh jompo yang tidak mampu lagi berpuasa, *al-hadyu* (berkorban karena pelanggaran dalam ibadah haji), dan hak tanggungan fakir miskin. Jika harta zakat tidak mencukupi maka pemerintah bisa menggunakan harta yang telah disebutkan di atas.

Dari beberapa pendapat tokoh yang konsen dalam bidang pengentasan kemiskinan ini memiliki banyak kesamaan. *Ibnu Hazm*, berpendapat kewajiban



sebuah negara adalah menjamin kepuasan akan kebutuhan dasar, meliputi makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan *Ibnu Taymiyah*, menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu masyarakat agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dan *Ibnu Khaldun* berpendapat negara hendaknya berfungsi sebagai penolong dan membantu rakyat dalam menjalankan usaha mereka secara lebih efisien. Dari pendapat tiga tokoh menitik beratkan pada sebuah negara dalam hal pengentasan kemiskinan, karena negara mempunyai kekuasaan sentral untuk mengatur rakyatnya menjadi lebih makmur. Sedangkan *Yusuf Qordhowi* memiliki pemikiran yang lebih kreatif, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara bekerja, jaminan famili dekat yang mampu, zakat, jaminan kas Islam dengan berbagai sumbernya dan hak-hak selain zakat.